PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN

Yohanes Arman¹, Mariana Marines Hardiyanti Meze², Yohanes Mardianus Nahak
Lebok³

nanaarman54@gmail.com¹, nanaarman54@gmail.com², mardilebok6@gmail.com³

Universitas katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan barang ilegal didorong oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan harga dan tarif antara negara, keuntungan ekonomi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kondisi sosial-ekonomi di wilayah perbatasan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas penyelundupan. Misalnya, perbedaan harga barang yang signifikan antara negara tetangga mendorong individu untuk menyelundupkan barang dari negara dengan harga lebih murah ke negara dengan harga lebih tinggi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan personel di wilayah perbatasan sering kali menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sementara korupsi di kalangan petugas penegak hukum dan bea cukai memperparah masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi antar instansi, kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan adaptif. Kebijakan ini juga mencakup pemberian insentif kepada masyarakat yang membantu mengungkap kasus penyelundupan dan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pengawas dan informan. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk memperbaiki strategi dan taktik dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal. Pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman barang-barang ilegal melalui tindakan tegas dan operasi gabungan. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, diharapkan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara dapat terjaga.

Kata Kunci: Peran pemerintah Indonesia, Kebijakan Pemerintah, Menanggulangi, penyelundupan, Barang Ilegal.

ABSTRACT

This research explores the efforts and policies implemented by the Indonesian Government in dealing with the smuggling of illegal goods in border areas. This study uses normative juridical methods to analyze legal norms and applicable laws and regulations. The research results show that the smuggling of illegal goods is driven by various factors, including differences in prices and tariffs between countries, economic profits, lack of supervision and law enforcement, and socio-economic conditions in border areas. These factors are interrelated and create an environment that supports smuggling activities. For example, significant differences in the prices of goods between neighboring countries encourage individuals to smuggle goods from countries with lower prices to countries with higher prices. In addition, limited resources and personnel in border areas often result in weak supervision and law enforcement, while corruption among law enforcement and customs officials exacerbates this problem. To overcome this problem, the government has implemented various policies which include strengthening supervision and law enforcement, coordination between agencies, international cooperation, community empowerment, as well as

developing comprehensive and adaptive policies and regulations. This policy also includes providing incentives to communities who help uncover smuggling cases and active participation of local communities as monitors and informants. Research and development continues to be carried out to improve strategies and tactics in tackling the smuggling of illegal goods. The government also shows its commitment to maintaining state security and protecting the public from the threat of illegal goods through firm actions and joint operations. By implementing effective policies, it is hoped that smuggling of illegal goods can be minimized, so that economic, social and state security stability can be maintained.

Keywords: *role of the Indonesian government, government policy, tackling, smuggling, illegal goods.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan negara pantai yang komponen Wilayahnya terdiri dari daratan, lautan, dan ruang Udara. Dua per tiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan. Indonesia juga disebut Sebagai negara kepulauan, karena struktur pulau-pulunya yang tersebar. Indonesia mempunyai Kondisi geografis yang unik di antara negara lain, Di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia Dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari Banyak pulau membuatnya disebut juga sebagai Negara maritim.

Secara geografis, posisi wilayah Indonesia Berada pada posisi silang, di antara benua Asia Dan Australia. Wilayah Indonesia juga berada di Antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Dua per tiga luas wilayahnya berupa lautan, Sehingga menjadi sangat strategis sebagai jalur Lalu lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang sangat terbuka juga Berbatasan langsung dengan sepuluh negara Tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api atau ring of fire.

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang Demikian, dapat menyebabkannya mempunyai Beberapa kewaspadaan sebagai berikut: Kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut Pengaruh di kawasan Asia pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kemungkinan terjadinya spill over (luapan) Dampak konflik kekerasan di Laut China Selatan, apabila eskalasi konflik terus Meningkat. Kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh Kepentingan negara besar yang dapat memicu Eskalasi sengketa batas wilayah negara Berjalan sesuai kesepakatan.

Kemungkinan terjadinya infiltrasi Kepentingan negara besar dengan Memanfaatkan isu kejahatan lintas negara karena masih Kurangnya kemampuan pengawasan terhadap Wilayah perairan dan udara nasional yang Sangat luas, serta terbuka. Kemungkinan terjadinya infiltrasi Kepentingan negara besar saat terjadi bencana Alam yang sangat besar. Aspek kewilayahan suatu negara termasuk di Dalamnya, menyangkut hal-hal mengenai Wilayah perbatasan merupakan daerah yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain. Letaknya yang terpencil seringkali menjadi jalur alternatif bagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang.

Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan suatu negara. Wilayah perbatasan, yang sering kali terletak jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki kondisi geografis yang menantang, menjadi titik rawan bagi aktivitas ilegal ini. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif. Signifikansi Wilayah Perbatasan.

Wilayah perbatasan merupakan garda terdepan kedaulatan suatu negara. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain membuatnya menjadi jalur masuk dan keluar yang strategis. Namun, kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya infrastruktur, serta

panjangnya garis perbatasan yang harus diawasi menjadikannya rentan terhadap aktivitas penyelundupan. Penyusup memanfaatkan kelemahan ini untuk membawa masuk barang-barang ilegal, seperti narkoba, senjata, barang konsumsi tanpa izin, dan produk lainnya yang merugikan negara dan masyarakat.

Dampak Ekonomi Penyelundupan Dari perspektif ekonomi, penyelundupan barang ilegal menimbulkan kerugian besar bagi negara. Barang-barang yang diselundupkan umumnya tidak melalui prosedur bea cukai yang sah, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan bea masuk. Selain itu, masuknya barang ilegal dengan harga lebih murah dapat merusak pasar lokal dan menekan industri dalam negeri. Ketika produk-produk ilegal ini beredar luas, para pelaku usaha yang mematuhi aturan menjadi korban persaingan tidak sehat, yang pada akhirnya melemahkan perekonomian nasional.

Dampak Sosial dan Keamanan Penyelundupan barang ilegal juga memiliki dampak negatif terhadap aspek sosial dan keamanan. Barang-barang seperti narkoba dan senjata ilegal berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan merusak tatanan sosial. Keberadaan senjata ilegal dapat memicu konflik bersenjata dan meningkatkan tingkat kekerasan di masyarakat. Sementara itu, penyebaran narkoba berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, yang dapat menghancurkan masa depan mereka dan menimbulkan beban sosial yang besar..

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Penyelundupan Untuk mengatasi masalah penyelundupan barang ilegal, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan serta strategi yang efektif untuk mencegah dan memberantas aktivitas penyelundupan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah: a. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan kapabilitas personel di titik-titik perbatasan strategis.

Penggunaan teknologi canggih seperti sistem pengawasan elektronik, drone, dan satelit sangat diperlukan untuk memantau aktivitas di wilayah perbatasan. Selain itu, peningkatan koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI sangat penting dalam melakukan operasi gabungan untuk menindak pelaku penyelundupan. Kerjasama Internasional Kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama sangat diperlukan untuk mencegah penyelundupan lintas batas. Partisipasi dalam forum-forum internasional yang fokus pada masalah penyelundupan juga dapat memperkuat upaya global dalam menanggulangi masalah ini.

Pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan melalui edukasi dan pelatihan tentang bahaya penyelundupan serta cara melaporkannya sangat penting. Masyarakat lokal dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang membantu mengungkap kasus penyelundupan..

Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika penyelundupan. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Kebijakan yang baik harus mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi Kasus-kasus Terkini dan Upaya Penanggulangan Untuk memberikan gambaran nyata tentang ancaman penyelundupan barang ilegal, beberapa kasus penyelundupan terbaru dapat dijadikan contoh. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi dan bagaimana pemerintah meresponnya. Misalnya, penangkapan besar-besaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional, penyelundupan senjata yang diungkap oleh aparat

keamanan, serta operasi-operasi gabungan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.

Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Penelitian yang mendalam dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada penting dilakukan untuk terus memperbaiki strategi dan taktik dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Pemerintah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang berkembang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta kedaulatan negara tetap terjaga.

Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah. Dengan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir. Dengan demikian, stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik, dan kedaulatan negara dapat dipertahankan. Pemerintah harus selalu waspada dan responsif terhadap dinamika penyelundupan yang terus berkembang untuk memastikan keberhasilan dalam upaya menanggulangi masalah ini

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hukum yang berlaku melalui analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan hukum dengan cara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan

Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya penyelundupan tersebut:

- a. Perbedaan Harga dan Tarif Perbedaan harga barang yang signifikan antara dua negara sering kali mendorong individu untuk menyelundupkan barang dari negara dengan harga lebih murah ke negara dengan harga lebih tinggi. Tarif bea cukai yang tinggi juga dapat mendorong penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak dan bea yang tinggi. Keuntungan Ekonomi Penyelundupan sering kali dilakukan karena keuntungan ekonomi yang besar. Barang ilegal seperti narkoba, senjata, dan barang-barang terlarang lainnya memiliki nilai jual yang tinggi di pasar gelap.
- b. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum, Keterbatasan sumber daya dan personel di wilayah perbatasan sering kali menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Korupsi di kalangan petugas penegak hukum dan bea cukai dapat memperparah masalah ini.
- c. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di wilayah perbatasan dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan penyelundupan sebagai sumber penghasilan. politik dan konflik di wilayah perbatasan juga dapat meningkatkan aktivitas penyelundupan.
- d. Teknologi dan Jaringan Kriminal

Kemajuan teknologi mempermudah penyelundup dalam merencanakan dan melaksanakan operasi mereka. Jaringan kriminal yang terorganisir dengan baik memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menyelundupkan barang dalam skala besar. Penanganan

masalah penyelundupan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pengawasan perbatasan, penegakan hukum yang tegas, kerjasama antar negara, dan penanganan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mendasari.

- e. Kondisi Geografis yang Sulit: Wilayah perbatasan seringkali memiliki medan yang sulit dijangkau, seperti hutan belantara atau pegunungan, yang memudahkan penyelundup untuk bersembunyi dan menyusup tanpa terdeteksi. Minimnya Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur di wilayah perbatasan membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit, sehingga memudahkan penyelundupan barang ilegal. Keterbatasan Personel Keamanan.
- f. Jumlah personel keamanan yang terbatas di titik-titik perbatasan strategis dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan. Kekurangan Teknologi Pengawasan, Minimnya penggunaan teknologi canggih seperti sistem pengawasan elektronik, drone, dan satelit dapat memudahkan penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Kebutuhan Ekonomi: Beberapa individu terlibat dalam penyelundupan barang ilegal karena melihatnya sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi sulit.
- g. Korupsi dan Kolusi: Praktik korupsi di lembaga penegak hukum dan pemerintahan setempat dapat memudahkan penyelundupan barang ilegal dengan memberikan jalan pintas kepada para pelaku. Kesenjangan Sosial: Ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah perbatasan dan pusat pemerintahan dapat memicu aktivitas penyelundupan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kegagalan Sistem Hukum.
- h. Terdapat kasus di mana aparat keamanan terlibat dalam aktivitas penyelundupan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memfasilitasi kelancaran penyelundupan barang ilegal. Perbedaan Kebijakan Antarnegara: Perbedaan kebijakan dan regulasi antara negara-negara yang berbatasan dapat dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan aktivitas ilegal. Keterlibatan Pihak Asing.
- i. Keterlibatan pihak asing dalam aktivitas penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelundupan. Kondisi Sosial Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyelundupan barang ilegal dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal tersebut juga dapat memengaruhi tingkat keberhasilan penyelundupan.
- j. Kondisi Politik: yang mengakibatkan Ketidakstabilan politik di wilayah perbatasan juga dapat mempengaruhi aktivitas penyelundupan barang ilegal, terutama jika terjadi perubahan kebijakan yang memengaruhi jalur penyelundup. Kondisi Ekonomi Global: Perubahan kondisi ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas atau mata uang, juga dapat mempengaruhi aktivitas penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan.
- k. Kondisi Keamanan Nasional: Tingkat keamanan nasional suatu negara juga dapat memengaruhi tingkat keberhasilan penyelundupan barang ilegal, terutama jika terdapat ancaman keamanan yang membutuhkan perhatian lebih dari aparat keamanan.

B. peran dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan

1. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Ini melibatkan peningkatan jumlah dan kapabilitas personel di titik-titik perbatasan strategis. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti sistem pengawasan elektronik, drone, dan satelit sangat diperlukan untuk

memantau aktivitas di wilayah perbatasan secara lebih efektif.

Koordinasi antar instansi juga menjadi aspek krusial dalam menanggulangi penyelundupan. Peningkatan koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI diperlukan untuk melakukan operasi gabungan yang lebih efektif dalam menindak pelaku penyelundupan. Dengan adanya koordinasi yang baik, upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga peluang keberhasilan dalam menanggulangi penyelundupan menjadi lebih besar.

Selain itu, kerjasama internasional juga sangat diperlukan dalam menghadapi penyelundupan barang ilegal yang seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama sangat penting untuk mencegah penyelundupan lintas batas. Partisipasi dalam forum-forum internasional yang fokus pada masalah penyelundupan juga dapat memperkuat upaya global dalam menanggulangi masalah ini.

Pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah perbatasan juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan. Pemerintah memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang bahaya penyelundupan serta cara melaporkannya. Masyarakat lokal dapat menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada masyarakat yang membantu mengungkap kasus penyelundupan.

Pengembangan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika penyelundupan juga menjadi fokus pemerintah. Kebijakan yang baik harus mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan penyelundupan yang terus berkembang.

Penelitian dan pengembangan juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal. Penelitian yang mendalam dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada penting dilakukan untuk terus memperbaiki strategi dan taktik dalam menanggulangi penyelundupan. Pemerintah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang berkembang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta kedaulatan negara tetap terjaga. Respon terhadap kasus terkini juga menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menghadapi ancaman penyelundupan. Penangkapan besar-besaran narkoba, pengungkapan jaringan internasional penyelundupan senjata, dan operasi gabungan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan adalah beberapa contoh nyata. Dengan operasi gabungan dan tindakan tegas, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman barang-barang ilegal.

Secara keseluruhan, peran pemerintah yang efektif dalam mengatasi penyelundupan barang ilegal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Dengan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan strategis untuk mengatasi penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Salah satu kebijakan utamanya adalah penguatan

pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dan kapabilitas personel di titik-titik perbatasan strategis. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pengawasan elektronik, drone, dan satelit untuk memantau aktivitas di wilayah perbatasan secara lebih efektif. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap upaya penyelundupan, sehingga upaya penegakan hukum bisa lebih efisien.

Kebijakan lainnya adalah koordinasi antar instansi. Pemerintah menyadari pentingnya sinergi antara berbagai instansi seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI. Dengan meningkatkan koordinasi, operasi gabungan dapat dilakukan dengan lebih efektif untuk menindak pelaku penyelundupan. Koordinasi yang baik juga memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, sehingga tindakan penegakan hukum bisa lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, setiap instansi bisa berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya bersama mengatasi penyelundupan. Dalam upaya menghadapi penyelundupan yang melibatkan jaringan lintas negara, pemerintah menerapkan kebijakan kerjasama internasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama. Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang fokus pada masalah penyelundupan juga menjadi bagian dari kebijakan ini. Kerjasama internasional ini bertujuan untuk memperkuat upaya global dalam menanggulangi penyelundupan dan memastikan keamanan di wilayah perbatasan. Dengan demikian, pemerintah dapat menghadapi ancaman penyelundupan yang bersifat transnasional dengan lebih efektif.

Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyelundupan. Melalui program edukasi dan pelatihan, pemerintah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya penyelundupan serta cara melaporkannya. Kebijakan ini juga mencakup pemberian insentif kepada masyarakat yang membantu mengungkap kasus penyelundupan. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat berperan aktif sebagai pengawas dan informan dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi penyelundupan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting karena mereka seringkali memiliki informasi yang tidak terjangkau oleh aparat pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan adaptif. Kebijakan yang diterapkan mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika penyelundupan, pemerintah dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang dengan lebih baik. Kebijakan ini juga memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi modus operandi baru yang mungkin digunakan oleh pelaku penyelundupan.

Kebijakan pemerintah juga mencakup penelitian dan pengembangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah melakukan penelitian mendalam dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada untuk terus memperbaiki strategi dan taktik dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal. Inovasi dan adaptasi berkelanjutan menjadi kunci dalam kebijakan ini, sehingga pemerintah dapat tetap relevan dalam menghadapi situasi yang selalu berubah. Penelitian ini juga penting untuk memahami tren dan pola penyelundupan, sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan lebih proaktif. Respon cepat terhadap kasus terkini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Penangkapan besar-besaran narkoba, pengungkapan jaringan internasional penyelundupan senjata, dan operasi gabungan yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan adalah contoh nyata dari

kebijakan ini.

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman barang-barang ilegal melalui tindakan tegas dan operasi gabungan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan, sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas kegiatan penyelundupan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi antar instansi, kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kebijakan dan regulasi, penelitian dan pengembangan, serta respon terhadap kasus terkini adalah langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Setiap kebijakan ini dirancang untuk saling mendukung dan memperkuat, sehingga menciptakan sistem yang komprehensif dan holistik dalam menanggulangi penyelundupan.

Dengan implementasi kebijakan yang efektif, diharapkan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir sehingga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara dapat terjaga. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat kebijakan ini dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan barang ilegal.

Terakhir, partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, instansi terkait, dan komunitas internasional, sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah ini. Dengan kerja sama yang solid dan komprehensif, penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan, sekaligus memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap aman dan terkontrol.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang unik dan strategis. Posisi geografisnya yang berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Hindia dan Pasifik menjadikannya jalur penting bagi lalu lintas dan perdagangan internasional. Namun, kondisi geografis yang luas dan terbuka ini juga menyebabkan kerentanan terhadap berbagai ancaman, termasuk penyelundupan barang ilegal. Wilayah perbatasan yang sulit dijangkau dan minim infrastruktur seringkali menjadi jalur alternatif bagi aktivitas ilegal ini, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Penyelundupan barang ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan. Secara ekonomi, kegiatan ini menyebabkan kerugian besar karena barang yang diselundupkan tidak melalui prosedur bea cukai yang sah, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan bea masuk. Selain itu, barang-barang ilegal yang beredar di pasar lokal dapat merusak pasar dan menekan industri dalam negeri. Dari sisi sosial dan keamanan, penyelundupan narkoba dan senjata ilegal meningkatkan angka kriminalitas, merusak tatanan sosial, dan mengancam kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting.

Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti sistem pengawasan elektronik, drone, dan satelit, sangat diperlukan. Peningkatan koordinasi antara berbagai instansi terkait serta kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan operasi bersama juga penting. Selain itu,

pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan tentang bahaya penyelundupan serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang komprehensif adaptif terhadap dinamika penyelundupan adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta kedaulatan negara tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC, "Peyelundupan Marak, Bea Cukai Raup 12,5 Triliun Rupiah dari Selundupan 2021, Penyelundupan Marak, Bea Cukai Raup Rp 12,5 T dari Selundupan", cnbcindonesia.com, diakses tgl 01 September 2023, Pukul 02.00 Wita
- Fatin, Crya Adra Fairuz..Strategi bea cukai juandadalam memberantas penyeludupan narkoba jaringan internasional.Universitas Islam Negri Sunnan Ampel Surabaya,2013.
- Hari Mulyono, Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 29, CV. Mandiri Citra Berdikari, Jakarta.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 200-2014: Nasionalisme dalam Era Perdagangan Bebas, KADIN, Jakarta. 2008.
- Mustofa, Muhammad, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.
- Semedi Bambang, Pengawasan Kepabeanan, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai , Jakarta,2013.
- Shaw Malcolm N., Hukum Internasional, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2013.
- Yohanes Imanuel umboh,"penegakan hukum bagi penyeludupan barrang di wilayah perbatasan",Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol.12 No. 4.